



Kritik terhadap internasionalisasi pendidikan tinggi ala kebijakan politik the *New Southbound* Taiwan

Priadi Surya *

Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.

Jl. Colombo No.1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia.

* Corresponding Author. Email: priadisurya@uny.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Received:

23 Juli 2021

Revised:

09 September 2021

Accepted:

30 September 2021

Available online:

30 September 2021

Keywords

internasionalisasi;
pendidikan tinggi;
kebijakan pendidikan;
internationalization;
higher education;
educational policy.

ABSTRACT

Artikel ini merupakan telaah kritis terhadap internasionalisasi pendidikan tinggi ala kebijakan politik *the New Southbound* Taiwan. Tujuan studi kepustakaan ini adalah (1) mendeskripsikan politik internasionalisasi pendidikan tinggi Taiwan; (2) membangun kritik terhadap politik internasionalisasi pendidikan tinggi Taiwan; (3) membangun gagasan implementasi politik internasionalisasi pendidikan tinggi di negara-negara berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan berupa re-interpretasi pemikiran dalam artikel kunci terpilih dan pembangunan gagasan oleh peneliti dengan mendasarkan kepada kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Taiwan menjalin kerjasama pendidikan tinggi dengan negara-negara yang terletak di bagian selatan, yang terutama ditempuh melalui mobilitas mahasiswa internasional dari dan ke dalam Taiwan; (2) pilihan politik internasionalisasi pendidikan tinggi Taiwan diindikasikan sebagai upaya dominasi Taiwan kepada negara-negara lain, dan upaya menghimpun sumber daya manusia berbakat untuk menggerakkan pembangunan berbagai sektor di Taiwan; (3) gagasan internasionalisasi pendidikan tinggi di negara-negara berkembang: (a) optimalisasi hubungan multilateral regional; (b) mahasiswa Indonesia studi di luar negeri; (c) peningkatan perguruan tinggi bertaraf internasional; dan (d) pendirian perguruan tinggi asing di negara-negara berkembang.

This paper is critical review towards Taiwan's internationalization higher education through the Southbound Policy initiative. The objectives of this article review are: (1) to describe higher education internationalization in Taiwan; (2) to criticize higher education internationalization in Taiwan; (3) to construct a conception of higher education internationalization in developing countries. The method applied in this article review is library research, which is re-interpretation of the selected key article and the construction of a conception about higher education internationalization, based on the relevant literature. The results show that: (1) Taiwan conducts cooperation in higher education with the southern countries, mainly through both the inbound and outbound international student mobility; (2) the political higher education internationalization in Taiwan is indicated as an effort to dominate other countries, and to gather talented human resources to run the development of various sectors in Taiwan; (3) the constructed conception of higher education internationalization in developing countries consists of: (a) optimization of regional multilateral relations; (b) citizens who study abroad; (c) the development of higher education towards international level; and (d) establishing foreign higher education institutions in developing countries.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



How to cite:

Surya, P. (2021). Kritik terhadap internasionalisasi pendidikan tinggi ala kebijakan politik the *new southbound* taiwan. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 9(2), 203-212. doi: <https://doi.org/10.21831/jamp.v9i2.42586>

PENDAHULUAN

Dewasa ini jumlah mahasiswa internasional di dunia semakin meningkat. Mahasiswa internasional yang dimaksud adalah mahasiswa yang menempuh studi di luar negara asalnya, baik untuk meraih gelar sarjana, magister/master, doktor, maupun dalam bentuk transfer kredit dan pelatihan singkat. Selama beberapa dekade, negara tujuan studi mahasiswa internasional didominasi oleh negara-negara Barat, dan atau *English-speaking countries*. Ini disebabkan oleh hegemoni akademik dan juga kinerja ekonomi dan politik dari negara-negara itu (Lin, 2020).

Meski begitu, saat ini Asia menjadi salah satu wilayah tujuan mahasiswa internasional yang begitu pesat berkembang. Perkembangan ini dikenal dengan semangat Kebangkitan Asia. Beberapa negara yang mulai nampak ikut mencuat dalam hal internasionalisasi pendidikan tinggi adalah Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Malaysia, serta Taiwan (Lin, 2020). Negara-negara ini mengikuti tujuan studi di Asia yang secara tradisional mendominasi sejak 1990-an, seperti China dan Jepang. Alasan dari mahasiswa internasional menempuh studi di Asia di antaranya dikarenakan pertimbangan: (1) kualitas pendidikan yang setara dengan negara-negara Barat, (2) biaya yang terjangkau, (3) ekonomi yang berkembang, (4) peluang kerja setelah lulus di negara tersebut (Lin, 2020).

Taiwan, sebagai salah satu negara tujuan studi mahasiswa internasional, telah menerapkan beragam kebijakan-kebijakan internasionalisasi sejak 1990-an. Sebagian kebijakannya dipengaruhi oleh tekanan politik dari negara tetangganya, yakni Republik Rakyat China (RRC). Kebijakan terkini Taiwan adalah *the New Southbound Policy (NSP)*, yang salah satu bagiannya adalah bidang pendidikan, di mana kebijakan ini mempromosikan mobilitas manusia unggul (*mutual talent mobility*) antara Taiwan dan negara-negara yang berada di selatannya (negara-negara ASEAN) (Lin, 2020). Kebijakan Baru ke Arah Selatan atau “the New Southbound policy” adalah bagian penting dari strategi ekonomi dan perdagangan Taiwan yang berujung mendefinisikan kembali peran penting Taiwan dalam pembangunan Asia, mengidentifikasi arah dan kekuatan pendorong baru dalam tahap baru pembangunan ekonomi, dan menciptakan nilai masa depan (Taipei Economic and Trade Office, 2018).

Namun, pemberdayaan sumber daya manusia, termasuk mahasiswa asing di Taiwan ini bukan tanpa masalah. Semisal pada tahun 2019 terungkap adanya kelebihan jam bekerja yang dialami mahasiswa yang kuliah sambil bekerja, yang sesungguhnya bagian legal dari *the Southbound Policy* ini (PPI, 2019). Namun kelebihan jam kerja ini diindikasikan sebagai kerja paksa. Praktik dua jalur atau *double track* (kuliah sambil bekerja) menjadi promosi dari Taiwan untuk menarik mahasiswa dari negara lain karena mereka memperoleh pendapatan dari pekerjaan yang dilakukan di samping kuliah, terlebih mengingat jumlah pembiayaan beasiswa yang terbatas,

Secara rinci terdapat 18 negara yang dimasukkan dalam *southbound* ini, yakni meliputi: Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Lebih lanjut, Indonesia, sebagai salah satu negara potensial di Asia Tenggara, mulai pula menerapkan internasionalisasi pendidikan tinggi, termasuk menyambut kebijakan internasionalisasi pendidikan tinggi Taiwan. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, dalam UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, terdapat Bagian Keempatbelas yang mengatur kerja sama internasional pendidikan tinggi. “Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.” (Pasal 50 ayat 1 UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi).

Bentuk internasionalisasi yang diatur dalam Undang-undang itu berfokus pada kerja sama internasional. Artinya, perguruan tinggi dapat menerima mahasiswa asing, dosen asing, ataupun program akademik dengan perguruan tinggi asing. Namun, lebih daripada itu, sesungguhnya lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di Indonesia (Pasal 65 ayat 1 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Terakhir, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, memberi ruang bagi investor asing untuk mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia dengan mengajukan perizinan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus.

Review artikel-jurnal internasional ini berupaya untuk menelaah lebih jauh kebijakan internasionalisasi pendidikan tinggi di Taiwan, sehingga negara-negara berkembang dapat memetik pelajaran untuk mengantisipasi tantangan global. Review artikel-jurnal internasional ini menjawab rumusan masalah berikut: (1) Bagaimanakah politik internasionalisasi pendidikan tinggi di Taiwan? (2) Bagaimana kritik atas politik internasionalisasi pendidikan tinggi di Taiwan? (3) Bagaimana kemungkinan implementasi politik internasionalisasi pendidikan tinggi di negara-negara berkembang?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang berupa re-interpretasi pemikiran dari penulis artikel kunci terpilih yang ditelaah, dan pembangunan gagasan oleh peneliti mengenai konsep implementasi politik internasionalisasi pendidikan tinggi untuk negara-negara berkembang. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan kepada sumber data utama terpilih, yaitu artikel karya Arianna Fang-Yu Lin, *Internationalization initiatives of Taiwan's higher education: a stepping stone to regional talent circulation or reproduction of unbalanced mobility scheme?*, diterbitkan oleh Jurnal *Higher Education Evaluation and Development*. Vol. 14 No. 2, 2020. pp. 69-91. Emerald Publishing Limited. 2514-5789. DOI 10.1108/HEED-06-2020-0017. Selanjutnya kritik ini juga mendasarkan kepada kajian literatur lainnya yang relevan sebagai sumber data sekunder (Yaniawati, 2020). Artikel Arianna Fang-Yu Lin dipilih karena artikel ini memberikan laporan terkini tentang internasionalisasi pendidikan tinggi Taiwan melalui *the New Southbound Policy*. Langkah-langkah yang ditempuh dalam telaah artikel ini adalah: (1) pemilihan topik; (2) eksplorasi informasi; (3) menentukan fokus penelitian; (4) mengumpulkan sumber data; (5) membaca sumber utama dan sumber sekunder; (6) membuat catatan; (7) mengolah catatan sebagai re-interpretasi pemikiran dalam artikel tersebut; (8) penyusunan laporan, termasuk pemaparan gagasan konsep implementasi politik internasionalisasi pendidikan tinggi di negara-negara berkembang (Yaniawati, 2020). Review artikel berperan sebagai wahana pengantar kepada penemuan masalah, menunjukkan di mana kesenjangan dalam bidang kajian atau keilmuan, dan menyediakan sebagian justifikasi atau kebutuhan untuk penelitian (Cohen et al., 2018). Ini juga memperjelas di mana kebaruan muncul di bidang kajian politik pendidikan dan kebijakan pendidikan, dan mengindikasikan di mana, bagaimana, dan mengapa penelaahan selanjutnya dalam konteks keindonesiaan diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Politik Internasionalisasi Pendidikan Tinggi di Taiwan

Kebijakan internasionalisasi pendidikan tinggi sebagai pilihan politik Taiwan dimulai sejak 1990-an. Pada 1995 arah kebijakan negara adalah memberikan perguruan tinggi tanggung jawab untuk mengembangkan pertukaran akademik dan budaya luar negeri dan hubungan bidang pendidikan. Selanjutnya, pada 2001 perguruan tinggi memulai keterlibatan aktif dalam urusan internasionalisasi, yang mana perguruan tinggi harus merumuskan anggaran untuk mempromosikan komunikasi dan kerjasama internasional untuk meningkatkan lingkungan internasional perguruan tinggi. Hingga kini, rekrutmen mahasiswa internasional secara aktif mendukung pencapaian penguatan pertukaran akademik, budaya dan pendidikan dengan negara asing dan meningkatkan daya kompetitif perguruan tinggi di kancah internasional.

Kebijakan internasionalisasi pendidikan tinggi Taiwan diimplementasikan dalam wujud: *Pertama*, pengembangan universitas kelas dunia dan rekrutmen mahasiswa internasional. Rekrutmen mahasiswa internasional saat ini juga dimaksudkan untuk memenuhi enrolmen atau jumlah mahasiswa pada perguruan tinggi swasta. Hal ini mengingat jumlah populasi penduduk Taiwan yang tidak begitu banyak, sedangkan perguruan tinggi tetap memerlukan *enrolment* mahasiswa. *Kedua*, menumbuhkan mahasiswa berbakat dalam negeri dan mengirim mahasiswa berbakat ke luar negeri. Pengiriman mahasiswa ke luar negeri bertujuan agar mereka lebih mengenal lingkungan regional, khususnya dalam southbound area. *Ketiga*, mempromosikan

sirkulasi mahasiswa berbakat dan merespon kebutuhan pendidikan di regional *southbound*. Kegiatan ini diwujudkan pemerintah Taiwan dengan menggaet negara-negara mitra untuk menjalankan mobilitas mahasiswa berbakat bersama atau saling bertukar, serta pengembangan bersama dengan negara-negara tetangga. Lebih jauh lagi, Taiwan menyediakan pelatihan profesional yang dirancang khusus dan menyediakan beasiswa.

Hasil penelitian Lin (2020) menunjukkan bahwa: *Pertama*, mobilitas antara mahasiswa Taiwan dan negara-negara *southbound* (terletak di selatan Taiwan) tidak seimbang sejak 2016. Meskipun mahasiswa dari negara-negara *southbound* secara bertahap meningkat dalam beberapa tahun, namun mahasiswa Taiwan nampak tidak berminat untuk menempuh studi di negara-negara *southbound*. Salah satu alasannya adalah adanya kesenjangan ekonomi, di mana hanya ada empat negara yang termasuk ekonomi kuat dibandingkan Taiwan, seperti Brunei Darussalam, Australia, New Zealand, Singapura. (2) Mahasiswa asing dari Vietnam, Indonesia, Thailand, India dan Filipina berkembang pesat sejak 2016. *Kedua*, persentase mahasiswa non-gelar dari negara-negara *southbound* ke Taiwan meningkat setelah implementasi kebijakan *the New Southbound Policy*. *Ketiga*, pertumbuhan jumlah mahasiswa menempuh jenjang sarjana menjadi ranking pertama di antara mahasiswa asing dari negara-negara *southbound*. *Keempat*, Mobilitas mahasiswa setelah implementasi kebijakan *the New Southbound Policy 2016*: (1) Negara dengan jumlah mahasiswanya di Taiwan meningkat dan jumlah mahasiswa Taiwan studi di negara tersebut juga sama-sama meningkat: India dan Thailand; (2) Negara dengan jumlah mahasiswanya di Taiwan yang menurun dan mahasiswa Taiwan yang studi di negara tersebut meningkat: Australia dan Malaysia; (3) Negara dengan jumlah mahasiswanya di Taiwan yang menurun dan mahasiswa Taiwan yang studi di negara tersebut juga sama-sama menurun: New Zealand dan Singapura; (4) Negara dengan jumlah mahasiswanya di Taiwan yang meningkat dan mahasiswa Taiwan yang studi di negara tersebut tidak bertambah atau menurun: Kamboja, Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Vietnam; (5) Model mobilitas mahasiswa tanpa interaksi antarnegara: Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Laos, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka.

Lin (2020) menunjukkan bahwa pilihan politik internasionalisasi pendidikan tinggi dari Pemerintah Taiwan melalui *the New Southbound Policy* cenderung lebih berdampak pada banyaknya jumlah mahasiswa internasional dari negara-negara *southbound* daripada mahasiswa Taiwan yang menempuh studi ke luar negeri, di negara-negara tersebut. Hal ini disebabkan karena bagi Taiwan sebagai negara maju, faktor-faktor pengembangan akademik, pertumbuhan ekonomi, dan faktor pribadi mahasiswa menjadi penentu keputusan studi ke luar negeri. Sebaliknya, pengembangan pendidikan yang lebih baik, budaya yang relatif sama, penyediaan beasiswa dan kedekatan geografis menjadi faktor penarik bagi negara-negara berkembang. Daya tarik keamanan ekonomi negara berkembang lebih kuat pada tingkat individu daripada dinamika tingkat makro.

Lebih jauh Lin (2020) juga menunjukkan bahwa Taiwan perlu menelaah kembali motif rekrutmen mahasiswa internasional. Ketika mayoritas mahasiswa internasional adalah di jenjang sarjana, ini akan menumbuhkan pendidikan di Taiwan secara cepat, namun bukanlah sumber daya manusia istimewa yang Taiwan butuhkan.

Kritik Terhadap Politik Internasionalisasi Pendidikan Tinggi di Taiwan: Dominasi Motif Ekonomi daripada Sosial-Budaya

Konsep Internasionalisasi Pendidikan Tinggi

Internasionalisasi secara umum diartikan sebagai proses pengintegrasian dimensi-dimensi internasional (antarnegara), antarbudaya, atau global kepada tujuan, fungsi-fungsi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi (de Wit, 2020). Pengertian ini menunjukkan internasionalisasi sebagai sebuah proses dan netral atas nilai-nilai. Aktualisasi dari internasionalisasi pendidikan tinggi meliputi mobilitas mahasiswa, beasiswa, dan program; reputasi dan pencitraan yang dimanifestasikan dalam pemeringkatan global dan regional; peralihan paradigma dari kerjasama menjadi kompetisi dipandang sebagai agenda internasionalisasi pendidikan tinggi lebih dari 30 tahun terakhir (de Wit, 2020). Ini selaras dengan Veugelers yang meneliti hal serupa di Eropa dan menyatakan, dalam pengembangan strategi internasionalnya, mayoritas institusi pendidikan tinggi,

termasuk yang di Eropa, lebih banyak berfokus pada mobilitas internasional dan rekrutmen mahasiswa dan ilmuwan, seiring dengan reputasi dan visibilitas internasional (Veugeliers, 2020). Lebih jauh, sekarang ini, pendidikan bertaraf internasional telah menjadi sebuah industri, sebuah sumber pendapatan dan begitu penting bagi peningkatan reputasi.

Lin (2020) memberikan gambaran internasionalisasi pendidikan tinggi saat ini di Taiwan, dalam bingkai politik *the New Southbound Policy*. Politik luar negeri ini bisa dipandang sebagai salah satu strategi persaingan terutama dengan negara tetangga yang menjadi rivalnya, yakni Republik Rakyat Cina (RRC), yang memiliki strategi geopolitik OBOR (*One Belt One Road*), yang sekarang direvisi menjadi proyek *Belt Road Initiative* (BRI), (Fabtian, 2018). Internasionalisasi pendidikan Taiwan dengan kerangka *the New Southbound Policy* menjadi salah satu sumber *soft power* yang berperan dalam diplomasi publik untuk membentuk penerimaan dan meningkatkan persepsi yang baik terhadap Taiwan. Internasionalisasi pendidikan negara-negara berkembang khususnya di kawasan Asia dijadikan sebagai upaya meningkatkan daya saing internasional, mengembangkan pendidikan universitas sebagai perdagangan untuk menghasilkan pendapatan nasional tambahan, dan untuk mengatasi penurunan populasi (Krisna, 2018; Ermylina, 2020).

Lin (2020) mempertanyakan “apakah inisiatif internasionalisasi pendidikan tinggi Taiwan merupakan sebuah batu loncatan bagi sirkulasi sumber daya manusia berbakat atau sebuah reproduksi atas skema mobilitas yang tidak seimbang?”. Jawaban umum atas pertanyaan ini adalah inisiatif internasionalisasi pendidikan tinggi Taiwan sementara ini masih cenderung membuat mobilitas sumber daya manusia (mahasiswa) berbakat yang tidak seimbang. Hal ini ditunjukkan bahwa jumlah mahasiswa internasional yang studi di Taiwan lebih banyak dibanding mahasiswa Taiwan yang studi di luar negeri. Meski begitu, Taiwan dapat dipandang cukup berhasil menjadi tuan rumah internasionalisasi pendidikan tinggi, dalam arti sebagai negara tujuan studi mahasiswa internasional. Ini merupakan suatu perkembangan signifikan apabila dibanding internasionalisasi pada umumnya pada tiga dekade terakhir menurut de Wit (2020), yang lebih berfokus pada internasionalisasi ke luar negeri daripada internasionalisasi di wilayah negara sendiri.

Kebijakan *the New Southbound Policy* yang digulirkan Pemerintah Taiwan menjadi induk pilihan politik yang cenderung mengutamakan motif penguatan ekonomi, terutama dengan menguasai negara-negara di selatan Taiwan, seperti kawasan Asia Tengah, Asia Tenggara (ASEAN), dan Australia-Oceania. Maka, sangat logis apabila dampak yang kemudian muncul dari internasionalisasi pendidikan tinggi Taiwan lebih dominan pada internasionalisasi pendidikan tinggi domestik Taiwan, terutama dengan menjadi tujuan studi mahasiswa internasional. Sebagai negara dengan ekonomi maju, motif ekonomi pada internasionalisasi model ini sudah jauh melewati nilai-nilai tradisional kegiatan internasional (de Wit, 2020). Menurut de Wit (2020), nilai-nilai tradisional yang mengarahkan kegiatan internasional di pendidikan tinggi masa lalu meliputi pertukaran dan kerjasama, perdamaian dan saling memahami, pengembangan sumber daya manusia, dan solidaritas. Walaupun nilai-nilai ini masih ada hingga sekarang dalam pembahasan pendidikan bertaraf internasional, internasionalisasi telah berkembang jauh dengan mendorong persaingan/kompetisi, pendapatan finansial, dan reputasi/pencitraan.

Internasionalisasi pendidikan tinggi Taiwan diindikasikan memuat motif ekonomi yang kuat, yang bersifat kuantitatif material. Ini sejalan dengan de Wit (2020) yang menyatakan bahwa internasionalisasi pendidikan tinggi secara global cenderung kompetitif, elitis, dan dipengaruhi kondisi pasar (*market direction*). Ini harus diimbangi dengan perhatian kepada dimensi-dimensi kualitatif internasionalisasi, seperti pengembangan warga negara, keterserapan kerja, peningkatan kualitas penelitian, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat.

Motif dan Arah Internasionalisasi Pendidikan Tinggi

Taiwan menyediakan beasiswa bagi mahasiswa internasional dan mengusahakan pendidikan tinggi Taiwan menjadi tujuan studi mahasiswa internasional. Lin (2020) menyebutkan salah satu tujuannya adalah juga menyiapkan SDM berbakat untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga terampil di sektor-sektor pembangunan Taiwan. Motif ini diindikasikan sebagai motif *economic-benefit* atau manfaat ekonomi, di mana secara *structural realism* negara bermaksud

memaksimalkan manfaat ekonominya, dan secara *social constructivism* norma-norma dan pemikiran-pemikiran secara domestik dan internasional mempengaruhi negara untuk mengarahkan kepentingan ekonominya (Forsudd, 2009). Hal ini dikuatkan oleh pendapat Veugelers (2020) bahwa bagi negara-negara yang diuntungkan dari mobilitas akademisi internasional, jaminan standar mutu yang tinggi perlu diteruskan dengan membuat lingkungan yang kuat untuk menarik sumber daya manusia internasional yang berbakat. Bakat-bakat terbaik yang bermigrasi akan menjadi pemerolehan tenaga unggul (*brain gain*) melebihi warga lokal yang lebih jauh akan mendorong kinerja prima negara. Pada gilirannya, ini meningkatkan daya tarik negara kepada tingkat yang lebih tinggi. Contoh keberhasilan dari penerapan jaminan standar mutu yang tinggi ini adalah Amerika Serikat, Swiss, Inggris Raya (United Kingdom) dan negara-negara Eropa Utara.

Idealnya, internasionalisasi pendidikan tinggi, dapat senantiasa menjunjung tinggi sifat pendidikan itu sendiri yang bersifat moral, sosial, dan berbudaya. Motif ini adalah motif solidaritas dan altruisme, di mana negara-negara mengusahakan terwujudnya norma-norma yang mempromosikan untuk saling bekerja sama yang telah terinternalisasi (Forsudd, 2009). Terkait dengan politik internasionalisasi pendidikan tinggi Taiwan dalam bingkai *the New Southbound Policy*, nampaknya motif solidaritas dan altruisme ini teraktualisasikan pada bagian mahasiswa Taiwan studi di luar negeri, di negara-negara *southbound*, yang mayoritas kemajuannya justru di bawah Taiwan. Mahasiswa-mahasiswa tersebut kemungkinan lebih kuat dalam motif sosial-budaya atau solidaritas dan altruisme global. Hadirnya mahasiswa internasional Taiwan di negara-negara berkembang secara tidak langsung berkontribusi kepada pemasukan finansial kepada negara setempat.

Aspek lain yang juga dapat dijadikan sudut pandang dalam internasionalisasi pendidikan tinggi adalah politik. Menurut Forsudd (2009) terdapat motif keamanan (*security*) dan kekuasaan (*power*) dalam hal jalinan internasional, termasuk penyediaan bantuan, seperti beasiswa. Dijelaskannya, dalam *structural realism* motif keamanan dan kekuasaan ini digambarkan saat negara termotivasi oleh kepentingan negaranya agar lebih aman dan berkuasa. Sedangkan dalam *social constructivism* motif keamanan dan kekuasaan tergambar pada saat ketidakamanan internasional mendorong negara-negara untuk bertindak dalam rangka melindungi keamanan dan kekuasaannya (Forsudd, 2009). Pemberian beasiswa dari suatu negara, seperti Taiwan, kepada mahasiswa internasional juga patut diduga memuat motif politik untuk keamanan dan kekuasaan. Untuk dapat menguasai negara-negara di kawasan tertentu, misal dalam *the New Southbound Policy*, Taiwan harus menguasai beragam informasi penting dari sana. Salah satu caranya adalah dengan penelitian oleh mahasiswa internasional yang studi di Taiwan (terutama jenjang magister dan doktor), dan pengiriman mahasiswa Taiwan ke negara-negara itu dengan melaksanakan penelitian di, dan, tentang negara setempat. Tidak tertutup kemungkinan, mahasiswa internasional yang studi di Taiwan dapat menjadi penghubung atau agen dengan wawasan Taiwan yang sudah terinternalisasi di dalam dirinya, yang pada jangka panjang diharapkan dapat menjadi pendukung kuat posisi politik Taiwan di negara-negara itu.

Kemungkinan Implementasi Politik Internasionalisasi Pendidikan Tinggi di Negara-negara Berkembang

Politik Luar Negeri: Optimalisasi Hubungan Internasional Multilateral Regional

Kemungkinan implementasi politik internasionalisasi pendidikan tinggi di negara-negara berkembang disajikan dengan mengambil konteks Indonesia sebagai fokus utama, di mana transibilitas atau generalisasi kepada negara-negara lain dapat dilakukan sepanjang ada kesamaan-kesamaan dengan konteks setempat. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, memiliki landasan, visi, dan misi politik luar negeri Indonesia yang termuat dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri. Hal-hal ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam konteks intermestik, kinerja diplomasi Indonesia telah menunjukkan penguatan, baik dalam kerangka bilateral, regional maupun multilateral. Upaya-upaya diplomasi multilateral dan regional yang akan dilakukan oleh Indonesia selanjutnya harus tetap diperkuat dengan diplomasi bilateral yang tangguh. Kebijakan luar negeri

secara aktif akan berupaya meningkatkan hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika maupun Amerika dan Eropa ke tataran yang lebih tinggi dan ditujukan pada pencapaian kepentingan nasional. Pengakuan internasional terhadap posisi Indonesia merupakan modal kuat dalam mengimplementasikan politik luar negeri Indonesia pada periode mendatang (Kemenlu, 2019). Kebijakan luar negeri Indonesia harus dapat mencerminkan transformasi demokratis di dalam negeri. Pada periode mendatang, perlu ditekankan pentingnya dukungan dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan bagi efektivitas politik luar negeri Indonesia dalam memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan internasional (Kemenlu, 2019).

Mengacu kepada arah kebijakan politik luar negeri Indonesia di atas, nampak hubungan erat terutama dibangun pada regional Asia Pasifik, seiring tetap bersinergi dengan negara-negara berkembang dan negara maju lainnya di regional Afrika, Amerika, maupun Eropa. Regional terdekat Indonesia adalah ASEAN, yakni negara-negara di Asia Tenggara. Lebih jauh, dalam kerjasama di wilayah ini, pendidikan menjadi salah satu bidang yang telah berserikat dalam SEAMEO (*The Southeast Asian Ministers of Education Organization*), organisasi kementerian pendidikan se-Asia Tenggara (SEAMEO, 2020). Organisasi ini didirikan 1965 di antara pemerintah negara-negara Asia Tenggara untuk mempromosikan kerjasama regional bidang pendidikan, ilmu dan kebudayaan di wilayah ini. Sebagai organisasi yang telah terus menerus meningkatkan kapasitas manusia dan mengeksplorasi potensi manusia seutuhnya, SEAMO memelihara kinerja dan aspirasi bagi pengembangan manusia di wilayah ini untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dalam kualitas dan kesetaraan di bidang pendidikan, pendidikan kesehatan yang preventif, kebudayaan dan tradisi, teknologi komunikasi, bahasa, pengentasan kemiskinan, sumber daya agrikultur dan alam.

Pengembangan internasionalisasi pendidikan tinggi Indonesia sesungguhnya dapat mengoptimalkan SEAMEO ini sebagai wadah mobilitas mahasiswa dan aktivitas internasionalisasi lainnya di wilayah ASEAN. Kerjasama multilateral ini nampak lebih efisien dibandingkan dengan membangun jalinan bilateral secara spesifik dalam bidang pendidikan ke negara-negara lain di luar ASEAN secara sendiri-sendiri, seperti *the New Southbound Policy* oleh Taiwan, misalnya. Jika Taiwan memilih prioritas jalinan internasional yang kuat dengan negara-negara di regional sebelah selatan negaranya secara bilateral simultan, Indonesia dapat menguatkan hubungan dengan negara-negara di regional Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN dan SEAMEO secara multilateral simultan.

Inisiatif kebijakan internasionalisasi pendidikan tinggi melalui SEAMEO ini juga memenuhi sebagian dari tujuh area prioritas (2015-2035), terutama area: (1) Revitalisasi Pendidikan Guru, dan (2) Promosi Harmonisasi Pendidikan Tinggi dan Penelitian (SEAMEO, 2020). *Pertama*, Pada area revitalisasi pendidikan guru, SEAMEO menginginkan jabatan guru sebagai profesi pilihan pertama melalui manajemen guru yang komprehensif, strategis, dan berbasis praktik, dan sistem pengembangan melalui persiapan yang lebih profesional di proses prajabatan dan dalam jabatan, diikuti sebuah kerangka kompetensi guru bersama yang eksplisit dan seperangkat standar yang dapat diaplikasikan lintas negara di wilayah Asia Tenggara. Perguruan tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), seperti UPI, UNY, UNJ, UM, dan sejenisnya, dapat berhimpun secara nasional untuk kemudian merumuskan dan menjalankan kerjasama regional Asia Tenggara. Inti dari kerjasama ini adalah agar ada pengakuan kesederajatan pendidikan guru baik di jenjang Sarjana Pendidikan dan Pendidikan Profesi Guru. Dengan demikian, mahasiswa internasional dari negara-negara Asia Tenggara ini dapat leluasa menempuh pendidikan guru di luar negara asalnya, dan dapat mudah pula untuk melanjutkan ke negara asal ataupun negara lainnya, hingga dapat diakui dan diizinkan mengajar sebagai guru di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, promosi harmonisasi pendidikan tinggi dan penelitian, pada tingkat kelembagaan dilaksanakan di negara-negara anggota SEAMEO yang berinvestasi di penguatan institusi pendidikan tinggi di mana setiap institusi menentukan kebutuhannya yang paling penting, didukung oleh penelitian, agar mampu berkoordinasi dan menentukan standar mutu dengan institusi lainnya (SEAMEO, 2020). Kegiatan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang menjadi inti tri darma perguruan tinggi dapat ditingkatkan pada taraf internasional dengan melibatkan dosen, peneliti, dan mahasiswa dari negara-negara mitra tersebut. Sebagai contoh,

nyatanya adalah kegiatan *visiting professor, joint research, joint publication, student exchange, transfer of credits*, dan sebagainya (UNY, 2021).

Internasionalisasi Pendidikan Tinggi melalui Mahasiswa yang Studi di Luar Negeri

Salah satu bagian dari inisiatif internasionalisasi pendidikan tinggi Taiwan adalah melalui mobilitas mahasiswa asal negara-negara berkembang yang menempuh studi di luar negeri (*outbound mobility*). Hal ini sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mobilitas mahasiswa Indonesia yang studi di luar negeri termasuk ke dalam pilihan kebijakan untuk meningkatkan internasionalisasi pendidikan tinggi, khususnya adalah SDM yang memiliki ijazah sarjana, magister, dan doktor dari luar negeri. Pada gilirannya, SDM dengan kapabilitas bertaraf internasional ini akan mendorong pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor. Khusus dosen yang studi di luar negeri, secara simultan ini akan meningkatkan internasionalisasi pendidikan tinggi dalam arti SDM-nya, dan juga berkontribusi kepada internasionalisasi institusi perguruan tingginya (Kemenristekdikti, 2019).

Program yang telah dan dapat dilaksanakan adalah penyediaan beasiswa studi luar negeri oleh lembaga-lembaga pemerintah dari negara-negara berkembang itu. Sebagai contoh, program beasiswa dengan skala besar bagi masyarakat Indonesia untuk studi ke luar negeri di antaranya: (1) Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPP-LN) Dikti, bagi dosen untuk jenjang S3/Doktor, dan bagi tenaga kependidikan untuk jenjang S2/Master; (2) Beasiswa Pendidikan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sumbangan mobilitas mahasiswa Indonesia studi di luar negeri, terkandung dalam tujuan umum penyediaan beasiswa LPDP, yakni beasiswa ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia Indonesia yang berpendidikan dan berkualitas serta memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi dan mempunyai visi masa depan bangsa yang kuat sebagai pemimpin Indonesia masa depan. Program Beasiswa LPDP ditujukan untuk peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi rakyat Indonesia, dengan tetap mengedepankan aspek kualitas pendidikan. Beasiswa LPDP diharapkan dapat menjadi lokomotif kemajuan bangsa Indonesia (LPDP, 2021).

Internasionalisasi Pendidikan Tinggi melalui Perguruan Tinggi Bertaraf Internasional di Negara-negara Berkembang

Internasionalisasi pendidikan tinggi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dapat diwujudkan pula melalui pengembangan perguruan tinggi bertaraf internasional atau berkelas dunia (*world class university*). Upaya-upaya internasionalisasi yang dapat dilakukan di antaranya: (1) Pengembangan Prodi Berstandar Internasional; (2) Kurikulum Berstandar Internasional; (3) Proses belajar mengajar berstandar internasional; (4) Penilaian Hasil Belajar Berstandar Internasional; (5) Bahan Ajar dan Sumber Belajar Berstandar Internasional; (6) Pengembangan Dosen Berkualifikasi Internasional; (7) Pengembangan Karyawan dan Tenaga Kependidikan lainnya untuk Menunjang WCU; (8) Sarana dan Prasarana Penunjang World Class University; (9) Pengelolaan Berbasis TIK dalam rangka menunjang WCU; (10) Perpustakaan Berstandar Internasional untuk menunjang WCU; (11) Kemahasiswaan Berkompetensi Internasional; (12) Penelitian dan Publikasi Ilmiah Berstandar Internasional; (13) Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) dalam kerangka WCU; (14) Kerjasama dan Pertukaran Internasional (Marsigit, 2009).

Internasionalisasi Pendidikan Tinggi melalui Pendirian Perguruan Tinggi Asing di Negara-negara Berkembang

Sebagai contoh, lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di Indonesia (Pasal 65 ayat 1 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Terakhir, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, memberi ruang bagi investor asing untuk mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia dengan mengajukan perizinan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus. Adanya lembaga pendidikan asing ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak di Indonesia untuk kemajuan pembangunan di berbagai sektor. Masyarakat akan mendapat dukungan layanan pendidikan internasional dan lembaga ini dapat

menjadi pusat keunggulan pendidikan bermutu tinggi dan bertaraf internasional, sebagai mitra pembangunan.

SIMPULAN

Politik internasionalisasi pendidikan tinggi di Taiwan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri, *the New Southbound Policy*. Kebijakan ini dominan pada ranah pengembangan ekonomi Taiwan sebagai negara maju untuk dapat menguasai pasar dan solidaritas politik di negara-negara yang terletak di bagian selatan Taiwan. Pendidikan tinggi menjadi salah satu sektor jasa yang ditawarkan untuk dapat menguatkan ekonomi Taiwan.

Kritik atas politik internasionalisasi pendidikan tinggi di Taiwan meliputi kuatnya motif ekonomi dalam inisiatif kebijakan tersebut. Sebagai negara yang sudah maju, Taiwan tetap menjaga mutu pendidikan tinggi dan menjadikannya tujuan studi mahasiswa internasional, yang memberikan pemasukan finansial dan penyediaan sumber daya manusia unggul. Motif tradisional sosial, budaya, dan juga politik tetap ada, khususnya dalam kegiatan mobilitas mahasiswa Taiwan ke negara-negara *southbound*.

Kemungkinan implementasi politik internasionalisasi pendidikan tinggi di negara-negara berkembang dalam regional prioritas cukup potensial dalam bingkai perserikatan negara-negara, sebagai contoh Indonesia di Asia Tenggara melalui ASEAN dan SEAMO. Adapun program-program yang dapat dilaksanakan adalah dengan (1) mobilitas mahasiswa studi di luar negeri, termasuk studi lanjut bagi dosen; (2) pengembangan perguruan tinggi kelas dunia; (3) pendirian perguruan tinggi asing di negara-negara berkembang.

Studi literatur atau penelitian berikutnya yang dapat dikembangkan berkaitan dengan artikel ini salah satunya adalah sejauhmana kebijakan New Southbound berdampak pada penyerapan tenaga kerja Indonesia dengan keterampilan tinggi di Taiwan. Selain itu, studi lainnya yang menarik dan memungkinkan dilakukan adalah berkenaan dengan dampak kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dan Taiwan terutama dalam aspek join kurikulum dan sharing SDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research Methods in Education* (8th ed.). Abingdon, Oxon: Routledge.
- de Wit, H. (2020). Internationalization of Higher Education: The Need for a More Ethical and Qualitative Approach. *Journal of International Students*, 10(1), i–iv. <https://doi.org/https://doi.org/10.32674/jis.v10i1.1893>
- Ermylina, E. (2020). *Kepentingan Taiwan dalam meningkatkan ikatan people to people melalui New Southbound Policy*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fabtian, D. R. A. (2018). Belt Road Initiatives (BRI): Intensi Supremasi Tiongkok di Samudra Hindia dan Respon Counterbalance dari India. *Jurnal Hubungan Internasional*, XI(2), 240–253.
- Forsudd, C. M. (2009). *The Motives of Aid Donors –A comparative study of the aid allocation of Denmark, Norway and Sweden*. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:234182/FULLTEXT01.pdf>
- Kemenlu. (2019). *Landasan, Visi Dan Misi Polugri: Ringkasan*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. https://kemlu.go.id/portal/id/read/12/halaman_list_lainnya/ringkasan
- Kemenristekdikti. (2019). *Pedoman Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019*. Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.
- Krisna, A. R. (2018). Strategi Internasionalisasi Sektor Pendidikan Pemerintah Taiwan dalam Era New Southbound Policy. *Journals FIS*.

- Lin, A. F.-Y. (2020). Internationalization initiatives of Taiwan's higher education: a stepping stone to regional talent circulation or reproduction of unbalanced mobility scheme? *Initiatives of Taiwan's Higher Education*, 14(2), 69–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/HEED-06-2020-0017>
- LPDP. (2021). *Tentang Beasiswa LPDP*. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan.
- Marsigit. (2009). Universitas Negeri Yogyakarta Menuju Perguruan Tinggi Bertaraf Internasional (PTBI), "Yogyakarta State University on the move toward World Class University." *Sidang SENAT Universitas Negeri Yogyakarta Komisi I Hearing Dengan PR I: Konsep WCU Pada Senin, 7 Desember 2009 Di UNY*.
- PPI. (2019). *Mahasiswa Indonesia di Taiwan Bukan Kerja Paksa*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/pksf3t335/ppi-mahasiswa-indonesia-di-taiwan-bukan-kerja-paksa>
- SEAMEO. (2020). *What is SEAMEO?* The Southeast Asian Ministers of Education Organization.
- Taipei Economic and Trade Office. (2018). *Presiden Tsai Ing-wen mengadopsi pedoman "New Southbound Policy."* Roc-Taiwan. https://www.roc-taiwan.org/id_en/index.html
- UNY. (2021). *Panduan Penyelenggaraan Visiting Professor (Masa Pandemi Covid-19)*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Veugelers, R. (2020). *Impact of Higher Education Internationalisation on the Economy*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja